

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu yang Relevan

Guna mendukung pembahasan terhadap setiap permasalahan, peneliti berupaya mencari berbagai penelitian terdahulu yang kiranya masih relevan terhadap permasalahan yang menjadi bahasan penelitian saat ini. Tidak hanya itu pencarian dan penggunaan penelitian terdahulu yang relevan digunakan sebagai syarat mutlak dalam penulisan penelitian ilmiah karena untuk mencegah adanya plagiarisme. Maka dari itu penelitian terdahulu tentang pembahasan yang terkait sangat diperlukan untuk eksplorasi dan penegasan penelitian.

Berdasarkan hasil pencarian terhadap penelitian-penelitian ilmiah yang terdahulu, peneliti telah menemukan salah satu penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang sedang dimuat. Meskipun secara garis besar tema peneliti ini terkait, tetapi fenomena yang terjadi berbeda dengan penelitian sebelumnya. Salah satu penelitian terdahulu yang relevan adalah sebagai berikut:

2.1.1 Febrillia Putu : Hubungan Diplomatik Antara Korea Utara dan Malaysia Pasca Terbunuhnya Kim Jong Nam Ditinjau Dari Konvensi Wina 1961. (2018)

Penelitian ini mengemukakan bahwa dalam pembahasannya peneliti membahas terkait pembuktian bahwa diplomasi telah dimulai sejak dahulu. Dibuktikan dengan zaman India kuno pada saat itu telah mengenal ketentuan ketentuan yang mengatur hubungan antar aja maupun kerajaan. Sehingga diplomasi

telah dilakukan oleh Raja-raja yang saling membutuhkan kerjasama antar satu sama lain. Walaupun tujuan dibangunnya hubungan diplomatik guna memenuhi kepentingan nasional suatu negara, juga membawa banyak kebaikan untuk negara yang saling membangun kerjasama. Tetapi pada hakikatnya hubungan diplomatik yang dibangun antar negara tidak selamanya berjalan dengan baik. Hubungan diplomatik yang dibangun bisa saja berubah jadi kekacauan dikarenakan beberapa hal. Seperti adanya perang antar kedua negara dan juga kasus sengketa atau bahkan pelanggaran yang dilakukan oleh utusan dari negara pengirim.

Hal ini bersamaan dengan fenomena yang terjadi di antara Malaysia dengan Korea utara hingga pemutusan hubungan diplomatik keduanya terjadi di tahun 2017. Isu yang terjadi di Malaysia pada tahun 2017 tewasnya salah satu warga asal Korea utara di bandara internasional Kuala Lumpur. Warga tersebut bernama Kim Jong-nam yang kebetulan posisinya memiliki jabatan tinggi di Korea Utara. Kim Jong-nam memang sudah menjadi incaran oleh rezim dari adik Kim Jong Un pemimpin Korea utara saat ini. Pada saat insiden tersebut terjadi di bandara, iya hendak melakukan penerbangan pada 6 Februari. Namun ketika ia sedang berada di bandara ada seorang wanita yang menyapanya dan tiba tiba saja menutupi wajahnya dengan kain yang sudah disiram dengan cairan yang beracun. Kemudian wanita tersebut diperkirakan meminta pertolongan kemeja informasi dan selanjutnya Kim Jong nam dilarikan ke rumah sakit dekat namun ia telah tewas di dalam perjalanan menuju rumah sakit. Hal ini yang membuat hubungan Malaysia

dan Korea Utara semakin menegang, hingga kedua belah pihak memutuskan untuk putus hubungan diplomatik.¹

Pada kasus ini, keterkaitan antar kedua kasus yang dibahas tentang Putusnya Hubungan Diplomatik Korea Utara dan Malaysia ditahun 2021 memiliki perbedaan dan persamaan yang signifikan. Pada persamaannya kedua negara sepakat untuk mengambil sikap memutuskan hubungan diplomatik, baik ditahun 2017 maupun di tahun 2021. Sedangkan dengan perbedaannya bisa dilihat dari sebab yang menjadikan mereka sepakat untuk putus hubungan diplomatik. Perbedaan sebab yang menjadikan mereka putus hubungan diplomatik ialah karena insiden pembunuhan terhadap Kim Jong Nam. Sedangkan di tahun 2021, Mun Chol Myong, pengusaha asal Korea Utara juga yang menetap selama 10 tahun di Malaysia melakukan pencucian uang sebanyak \$1,5 Juta. Hingga Malaysia memutuskan secara sepihak untuk mengekstradisi Mun ke Amerika Serikat atas permintaan pihak FBI Amerika sejak 2019 silam.

2.1.2 Mohd. Ridwan Bin Thalib *An Analysis Of The Vienna Convention On Diplomatic Relations 1961: A Case Of Diplomatic Relations Between Malaysia And North Korea (2022)*

Penelitian ini menjabarkan penelitian yang sama terkait penelitian sebelumnya pada pembunuhan Kim Jong Nam yang berdampak pada hubungan diplomatik Malaysia dan Korea Utara yang sedikit menyinggung juga terkait

¹ Febrilia,Putu, “ Hubungan Diplomatik Antara Korea Utara dan Malaysia Pasca Terbunuhnya Kim Jong Nam Ditinjau Dari Konvensi Wina 1961”, Vol 1 Tahun 2018.

sejarah evolusi hubungan diplomatik. Sedikit yang diketahui tentang sifat hubungan diplomatik antara Malaysia dan Korea Utara terutama ketika persepsi publik menyatakan bahwa kedua negara hampir tidak memiliki kesamaan. Dalam memahami implikasi kasus pembunuhan dari perspektif hukum internasional, dilakukan analisis tentang sejarah hubungan diplomatik antara Putrajaya dan Pyongyang. Kajian lebih lanjut dilakukan terhadap faktor-faktor yang menjadi daya tarik Malaysia dan Korea Utara untuk menjalin dan mempererat hubungan diplomatik.

Kebijakan luar negeri inklusif Malaysia disorot melalui partisipasinya dalam Gerakan Non-Blok (GNB) pada tahun 1970 yang mempromosikan keterlibatan damai dengan semua negara terlepas dari kesetiaan politik mereka, termasuk rezim yang dipimpin Komunis di Korea Utara. Tugas menjaga keamanan kawasan dan meningkatkan kemakmuran ekonomi berada di atas daftar prioritas Putrajaya. Kedua negara yang bertikai harus mengeksplorasi metode di luar kerangka konvensional Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik 1961.

Pada kasus ini juga kedua negara sama seperti penelitian terdahulu yang disebutkan diatas, bahwa keduanya memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Dalam persamaannya kedua negara sepakat untuk memutus hubungan diplomatik ditahun 2017 dan 2021. Selanjutnya mengenai perbedaan pada penelitian ini ialah adanya pengambilan sikap setelah putusya hubungan diplomatic gua memperbaiki hubungan persahabatan antar kedua belah pihak. Dari itu dalam rangka memperbaiki dan menghidupkan kembali hubungan diplomatik mereka yang

terputus seperti Jalur Diplomasi dalam bentuk Diplomasi Olahraga. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun hubungan antara kedua negara terputus, sangat penting bagi Malaysia untuk mempertimbangkan untuk menghidupkan kembali dan meningkatkan hubungan bilateral dengan Korea Utara, sehingga menguntungkan Putrajaya dalam menguraikan kebijakan luar negeri Malaysia di masa depan.²

2.1.3 Fata Alamsyah: *The Severance of Diplomatic Relations Between Malaysia and North Korea: Is It Against Internatioal Law?* (2021)

Penelitian ini mengungkapkan terkait kasus putusnya hubungan diplomatik antara Malaysia dan Korea Utara di tahun 2021 yang dilihat dari kaca mata hukum internasional, apakah keputusan kedua belah pihak dan sebab yang menjadikan hal tersebut terjadi menjadi pelanggaran hukum internasional atau tidak. Sedikit kiranya bisa dijabarkan disini bahwa disebutkan pemutusan hubungan diplomatik antar negara di dunia internasional hukum diperbolehkan sebagai bentuk tekanan politik tertentu terhadap negara lain, yang bertujuan untuk negara yang ditekan untuk mengubah kebijakan luar negeri atau menghukum tindakan tertentu yang telah diambil yang dianggap tidak sesuai dengan hukum internasional, karena misalnya melakukan tindakan provokasi, melanggar batas. intervensi dalam urusan dalam negeri negara lain atau urusan politik lainnya.

Pemerintah Malaysia menuduh pemerintah Korea Utara penghasutan, kegiatan pendukung, dan pendanaan teroris bersenjata yang terkait dengan tujuan

² Ridwan, Mohd. *An Analysis Of The Vienna Convention On Diplomatic Relations 1961: A Case Of Diplomatic Relations Between Malaysia And North Korea*, Universiti Sains Islam Malaysia, Malaysia, 2022.

memprovokasi, menyabotase, dan menyebarkan kekacauan perdagangan internasional. Menanggapi sikap Korea Utara, Malaysia memerintahkan seluruh staf diplomatik di Kedutaan Besar Korea Utara di Kuala Lumpur akan meninggalkan Malaysia dalam waktu 48 jam. Sebelum perintah untuk meninggalkan Kuala Lumpur bagi staff kedutaan Korea Utara dideklarasikan, adanya keputusan pengadilan Malaysia mengenai Mun Chol Myong bisa menjadi diekstradisi ke AS untuk menghadapi tuduhan pencucian uang, karena diduga mengekspor barang terlarang ke Korea Utara, yang melanggar ketentuan internasional PBB sanksi yang dijatuhkan. Dalam tindakan Persona-No-Grata, Malaysia tidak melanggar ketentuan hukum internasional. Pasal 9 ayat 1 Konvensi Wina memberikan negara yang menghidupkan kembali kesempatan itu, dengan membuat pemberitahuan untuk itu kepada pengirim.³

Bisa ditarik kembali terkait persamaan dan perbedaan antar kedua sisi penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yang dimuat. Bahwa kedua belah pihak sepakat untuk memutuskan hubungan diplomatik. Namun yang menjadi perbedaan dalam kasus ini adalah, penelitian ini berfokus pada pembuktian apakah keputusan kedua negara Malaysia dan Korea utara untuk berpisah telah melanggar hukum internasional. Pada kesimpulannya disebutkan bahwa Malaysia sebagai negara yang melakukan ekstradisi Mun Chol Yong ke Amerika Serikat tidak melakukan pelanggaran atas perjanjian ekstradisi antara Malaysia dan Amerika Serikat, maupun dengan hukum internasional.

³ Alamsyah Fatra, *The Severance of Diplomatic Relations Between Malaysia and North Korea: Is It Against International Law?*, Yogyakarta, 2021

2.1.3 Perbandingan Penelitian Terdahulu

1.1 Tabel Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Pemutusan Hubungan Diplomatik Korea Utara – Malaysia Di Tahun 2021

Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
Febrillia Putu (2018): Hubungan Diplomatik Antara Korea Utara dan Malaysia Pasca Terbunuhnya Kim Jong Nam Ditinjau Dari Konvensi Wina 1961	Sikap kedua negara yang mengambil keputusan untuk memutuskan hubungan diplomatik kedua negara. Pada tahun 2017 dan 2021.	Isu yang berbeda, di tahun 2017 sebab diputuskannya hubungan diplomatik antar keduanya, karena insiden pembunuhan terhadap Kim Jong Nam. Sedangkan di tahun 2021, Mun Chol Myong, pengusaha asal Korea Utara juga yang menetap selama 10 tahun di Malaysia melakukan pencucian uang sebanyak \$1,5 Juta. Hingga Malaysia memutuskan secara sepihak untuk mengekstradisi Mun ke

		Amerika Serikat atas permintaan pihak FBI Amerika sejak 2019 silam.
Mohd Ridwan Bin Thalib (2022): An Analysis Of The Vienna Convention On Diplomatic Relations 1961: A Case Of Diplomatic Relations Between Malaysia And North Korea	Sikap kedua negara yang mengambil keputusan untuk memutuskan hubungan diplomatik kedua negara. Pada tahun 2017 dan 2021.	Penyebab yang sama dengan penelitian sebelumnya terkait pembunuhan Kim Jong Nam ditahun 2017, namun dengan perbedaan penyelesaian masalah untuk membangun hubungan diplomatik lagi dengan adanya bentuk diplomasi olahraga.
Fata Alamsyah (2021): The Severance of Diplomatic Relations Between Malaysia and North Korea: Is It Agaist Internatioal Law?	Sikap kedua negara yang mengambil keputusan untuk memutuskan hubungan diplomatik kedua negara. Pada tahun 2017 dan 2021.	Menjustifikasi terkait hukum internasional, apakah keputusan yang diambil kedua belah pihak untuk mengakhiri hubungan diplomatik melanggar hukum internasional atau tidak.

2.2 Pengertian Dari Kajian Kepustakaan

Pada penulisan proposal penelitian ini, peneliti menggunakan teori neorealisme dan juga sebagai acuan dalam proses penulisan.

2.2.1 Landasan Teori : Teori Neorealisme

Seperti yang kita ketahui adanya teori neorealisme ini berangkat dari kritik teori realisme yang mana teori tersebut sangat dominan pada lingkup Hubungan Internasional. salah satu pemikiran dari salah seorang tokoh neorealis, Waltz berpendapat teori bukan semata-mata pernyataan mengenai semua hal yang penting dibahas, tetapi teori memiliki fungsi khusus guna mempersempit suatu definisi yang sebelumnya bermakna global. Menurutnya juga, teori sebagai konstruksi intelektual yang dengannya kita memilih beberapa fakta dan menafsirkannya. Terkait neorealisme sendiri, Waltz memiliki pertanyaan dasar, yang akhirnya ia memecahkan jawabannya sendiri. Berawal dari pertanyaan” mengapa negara menunjukkan sikap kebijakan luar negeri yang sama meski sistem politiknya berbeda dan ideologi mereka yang bertentangan?” munculah pandangan Waltz terkait apa yang ia kritik dari realisme klasik.⁴

⁴ Burchill, Scoot. “ Teori-Teori Hubungan Internasional”, New York: ST Martin’s Press. 1966 hal 90-121

Memang pada awalnya realisme hadir karena kemampuannya menyatakan argumen karena kebutuhan yang memiliki habit untuk menjabarkan realitas sekaligus memecahkan masalah yang sedang berlangsung. Tetapi seiring perkembangan zaman, teori klasik pun (realisme) juga ikut berkembang karena kritik dan pemikiran kritis Waltz terkait mengapa kebijakan negara-negara mayoritas memiliki kesamaan dalam menetapkan kebijakan luar negeri, walaupun konsep internalnya berbeda-beda.⁵ Dari pertanyaan ini dapat memberi jawaban bahwa tiap-tiap negara tetap memprioritaskan kepentingan nasionalnya dengan mengambil sikap yang sama dengan negara lain, untuk mempertahankan integritas negara tersebut.

Dari sumber lain terkait Neorealisme, menjabarkan kembali bahwa neorealisme sebagai kritik dari realisme klasik. Bahwa analisis realisme klasik yang berfokus pada sifat dasar manusia sebagai pendorong perilaku negara ini menimbulkan permasalahan. Realisme juga berargumen bahwa permasalahan yang muncul dan kondisi politik internasional yang terjadi saat ini adalah hasil dari titik lemah beberapa negara (titik lemah suatu negara berasal pula dari sifat asli manusia sebagai masyarakat suatu negara). Berangkat dari pandangan ini, neorealisme mengkritik pandangan realisme, yang mana bisa disimpulkan bahwa realisme berpandangan perilaku masyarakat suatu aktor (negara) yang mempengaruhi tatanan internasional.

⁵ *Ibid*

Sedangkan neorealisme menyangkal pandangan tersebut dengan tatanan dunia atau sistem internasional lah yang mengatur perilaku suatu negara. Sebab dari itu, walaupun perbedaan internal negara-negara seperti sistem pemerintahan dan ideologinya berbeda, tak heran jika memiliki kesamaan dalam penetapan kebijakan luar negeri.⁶

Sumber buku ketiga ini kiranya sama dengan sumber-sumber buku yang sebelumnya. Yang mana terkait realisme dengan dinamikanya yang terjadi dengan adanya sanggahan dengan kemunculan neorealisme. Kiranya ada beberapa masukan dari neorealisme kepada realisme yang akan dipaparkan diantaranya sebagai berikut; dibutuhkan upaya susunan baru terkait konseptualisasi dan pembaharuan teori berdasarkan fakta yang sedang terjadi terutama dalam memahami perkembangan yang sedang terjadi dalam hubungan Internasional.⁷ Hal ini kiranya penting dilakukan karena fenomena yang terjadi di kancah internasional terus berkembang. Serta kepada para penstudi Hubungan Internasional hendaknya menggabungkan beberapa konsep dan teori serta pilihan kebijakan dalam menghadapi berbagai fenomena hubungan internasional yang semakin beragam.⁸

⁶ Dharmaputra, Radityo pada; “*Teori-Teori Hubungan Internasional (Perspektif-Perspektif Klasik)*” Airlangga University Press hal 99-100

⁷ P. Hermawan Yulius, “*Transformasi Dalam Studi Hubungan Internasional; Aktor, Isu, Metodologi*”, 2007, hal 33-41

⁸ *Ibid.* Hal 46

Dari penjabaran yang telah dipaparkan di atas terkait teori Neorealisme ini, peneliti menggunakan neorealisme sebagai landasan teori karena teori ini cukup relevan dengan pembahasan yang akan dimuat pada penulisan ini. Pemutusan hubungan diplomatik yang dilakukan oleh Malaysia dan Korea Utara disebabkan insiden ekstradisi Mun Chol Myong pengusaha asal Korea Utara ke Amerika Serikat atas keputusan sepihak Malaysia. Isu ini berkaitan dengan realisme berdasarkan pandangan Waltz terkait pengambilan kebijakan luar negeri beberapa negara bisa sama walaupun internal ideologi dan sistem pemerintahan yang berbeda. Keduanya saling menyetujui bahwa pengambilan kebijakan untuk memutuskan hubungan diplomatik karena insiden ekstradisi tersebut.

2.2.2 Konsep Diplomasi

Diplomasi ialah salah satu bagian penting dalam menjalankan kepentingan suatu negara. Diplomasi juga menjadi faktor utama untuk proses meraih kepentingan nasional yang berkaitan dengan negara lain. Dengan membangun hubungan diplomasi suatu negara bisa mengenalkan integritasnya serta menambah relasi persahabatan dengan negara negara yang terlibat. Sejatinya berdiplomasi telah dimulai sejak suatu negara membangun hubungan kerjasama bilateral dengan negara lain atas kesepakatan bersama. Dengan begitu hubungan diplomatik antar kedua negara bisa memberikan keuntungan antar keduanya.⁹

⁹ Roy, S.L, "Diplomasi", November 1991, hal 5

Ditinjau dari kedua ahli Etnes Satow dan Barston, keduanya memiliki pandangan terkait diplomasi. Satow berpandangan bahwa penerapan atau pengaplikasian suatu diplomasi kepada suatu aktor maupun aktor negara yang sebelumnya menjadi jajahan mereka.¹⁰ Karena tidak dapat dipungkiri bahwa suatu negara besar menjajah karena ingin mendapatkan keuntungan dari kelebihan yang dimiliki oleh negara yang mereka jajah. Maka dari itu tidak menutup kemungkinan negara besar kembali ingin membangun diplomasi kepada negara yang dulunya mereka jajah. Selain itu dari pandangan lain Barston juga berpandangan terkait diplomasi. Menurutnya diplomasi ialah membangun suatu manajemen antar negara maupun oleh suatu negara dengan aktor internasional lainnya.¹¹

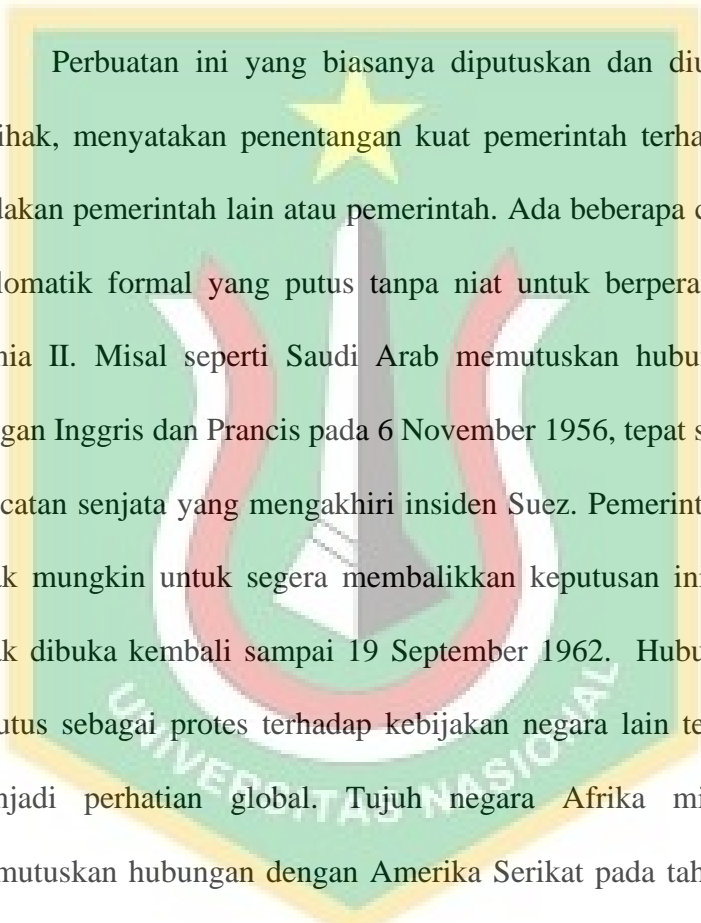
2.2.3 Severance of Diplomatic Relations

Misi diplomatik juga dihentikan ketika hubungan diplomatik antara dua negara bermasalah. Ini terjadi ketika suatu negara memutuskan untuk putus hubungan diplomatik dan menarik perwakilan diplomatiknya sebagai protes atas kebijakan pemerintah lainnya. Ada banyak contoh perilaku seperti ini. Salah satu contohnya adalah India keputusan untuk mengakhiri hubungan diplomatik dengan Portugal. Pada tahun 1954, India memutuskan hubungan diplomatik dengan Portugal sebagai protes atas kebijakan pemerintah Portugis di Goa, dan Menteri Portugis di Delhi diperintahkan untuk pergi. Negara-negara telah diketahui memutuskan hubungan

¹⁰ Sir Ernest Satow, "A Guide to Diplomatic Practice", Longman Green, Newyork, 1991, hal.1

¹¹ RP. Barston, Modern Diplomacy, Longman, Newyork,1997, hal. 1

diplomatik dengan negara-negara yang mengganggu atau bertindak memusuhi mereka. Namun, kontak diplomatik telah diakhiri sebagai tanda protes terhadap kebijakan negara tertentu, bahkan jika kebijakan tersebut tidak boleh secara langsung merugikan kepentingan negara yang memutuskan hubungan.



Perbuatan ini yang biasanya diputuskan dan diumumkan secara sepihak, menyatakan penentangan kuat pemerintah terhadap bahasa atau tindakan pemerintah lain atau pemerintah. Ada beberapa contoh hubungan diplomatik formal yang putus tanpa niat untuk berperang sejak Perang Dunia II. Misal seperti Saudi Arab memutuskan hubungan diplomatik dengan Inggris dan Prancis pada 6 November 1956, tepat satu hari sebelum gencatan senjata yang mengakhiri insiden Suez. Pemerintah Saudi merasa tidak mungkin untuk segera membalikkan keputusan ini, jadi hubungan tidak dibuka kembali sampai 19 September 1962. Hubungan juga dapat diputus sebagai protes terhadap kebijakan negara lain tentang hal yang menjadi perhatian global. Tujuh negara Afrika misalnya, mereka memutuskan hubungan dengan Amerika Serikat pada tahun 1965, karena ketidakpuasan dengan penanganan Inggris atas deklarasi kemerdekaan sepihak dan tidak sah.

Perlu juga dicatat bahwa pemutusan hubungan bilateral tidak bisa selengkap itu seperti yang terjadi sebelum berdirinya organisasi-organisasi internasional. Bahkan jika negara tidak berbicara satu sama lain, kemungkinan kedua belah pihak akan menerima respon pasif terhadap

penerimaan perwakilan dalam badan-badan multilateral. Implikasinya, koeksistensi seperti itu mengubah menjadi perubahan baik atas pelanggaran hubungan diplomatik. Ini juga memberikan kesempatan bagi perwakilan dari kedua belah pihak untuk bertemu secara pribadi. Kontak semacam itu juga dapat terjadi antara perwakilan dari negara ketiga, meskipun metode ini lebih cenderung menarik perhatian dunia atau perkiraan terburuknya bisa membahayakan kesuksesan kerjasama antar kedua negara

Ketika permintaan untuk penarikan perwakilan negara dibuat, hal utama yang akan terlihat dampaknya ialah pemerintah dapat mencoba untuk bernegosiasi. Namun setelah masalah tersebut menjadi publik, upaya ini tidak mungkin menghasilkan banyak manfaat. Bagaimanapun seorang duta yang menolak untuk pergi setelah diminta untuk melakukannya akan menemukan dirinya dalam situasi yang memalukan dan tentu saja ini menjadi situasi yang tidak mungkin. Jarang ada manfaat dalam membalas dendam, kecuali jika duta yang diusir kebetulan berada di ambang keberadaan menyatakan persona non grata sendiri. Karena keberadaan hubungan diplomatik tergantung pada kesepakatan antara dua negara yang terlibat. Fungsi agen diplomatik yang terlibat berakhir atas pemberitahuan oleh negara yang memulai pelanggaran.

Selanjutnya, negara penerima berkewajiban untuk mengizinkan agen diplomatik meninggalkan negara itu. Juga pada Konvensi Wina Pasal 45 mengharuskan negara penerima untuk menghormati dan melindungi gedung kedutaan, serta harta benda dan arsipnya. Dilanjutkan

pada Pasal 44 dan 45 dalam Konvensi Wina menegaskan bahwa pemutusan hubungan diplomatik, baik diikuti atau tidak dengan permusuhan, tidak berpengaruh pada status diplomat atau kewajiban negara penerima. Diplomasi pada abad sebelum 1914 sebagian besar didominasi oleh Kekuatan Besar bertindak langsung atau atas nama negara klien. Ini berarti bahwa runtuhnya hubungan diplomatik hubungan adalah masalah serius yang dapat dan sering kali menyebabkan perang.

2.2.4 Teori *Carrot and Stick*

Mungkin sebagian dari penstudi HI sudah mendengar teori *Stick and Carrot* tetapi mungkin juga Sebagian lainnya belum. Pada politik internasional yang menjadi bagian dari hubungan internasional, teori ini juga sering digunakan oleh negara yang menduduki sebagai aktor dalam hubungan internasional yang memiliki hubungan, keterkaitan atau relasi yang berhubungan dengan negara lainnya. Pada teori ini (*carrot and stick*) adalah pendekatan yang cukup sering digunakan oleh kaum realis yang menjelaskan konsep *hard power* dalam lingkup Hubungan Internasional. Aktor politik internasional yang memiliki dominasi power pada suatu kasus dapat mengimplementasikan teori ini guna memenuhi kepentingannya.

Pada definisinya sendiri, *carrot* atau wortel memiliki arti yang spesifik dengan penghargaan atau hadiah, bagi aktor pihak kedua yang siap bersedia untuk mengikuti kebijakan yang dibuat dan disepakai oleh negara yang memiliki power. Begitu juga dengan *stick* yang memiliki arti hukuman, hukuman yang akan diberikan jika aktor tidak mengikuti

kebijakan yang diberikan oleh negara yang memiliki power. Lebih sempitnya lagi teori ini memiliki defeni yang berarti *reward* dan *punishment*.¹² Melihat dari kasus yang dibahas, pada sudut pandang Malaysia sendiri, ia mendapat tekanan dari Amerika Serikat untuk mengekstradisi salah satu warga Korea Utara yang sebenarnya adalah warga dari negara sahabatnya sendiri. Lain dari pada itu Malaysia sudah memiliki ikatan terkait kebijakan ekstradisi dengan Amerika Serikat, mengenai hal tersebut Malaysia berada diposisi yang sulit.

2.3 Kerangka Pemikiran

Pada penulisan proposal penelitian ini, objek yang akan ditulis adalah sikap kedua negara Korea Utara dengan Malaysia pada saat mengambil keputusan untuk memutus hubungan diplomatik dan dampak setelahnya. Kutipan menarik yang akan dibahas pada penelitian ini adalah, bagaimana hubungan kedua negara yang bersahabat sejak tahun 1973, yang sempat retak di tahun 2017, dan redam kembali, lalu putus hubungan diplomatik kembali di tahun 2021. Selain itu, menariknya hubungan kedua negara ini walaupun dampak yang dihasilkan dari kerjasama antar kedua negara ini terbilang kecil. Tetapi suatu prestasi bagi Malaysia sebagai satu-satunya negara di Asia Tenggara yang memiliki hubungan baik dengan Korea Utara.

¹² Simon Gachter, "Carrot or Stick?", *Social Science Natural Journal*, Vol.483 (2012)

Hukum diplomasi sebagai dasar membangun hubungan diplomatik bisa dilakukan atas persetujuan negara-negara yang bersangkutan. Malaysia dengan Korea Utara sama-sama memulai persahabatan dan kerjasama mereka di tahun 1973. Namun retak begitu saja di tahun 2021 dikarenakan insiden ekstradisi warganya ke Amerika Serikat atas dugaan pencucian uang \$1,5 Juta. Hubungan diplomatiknya putus sebagai bukti kemarahan Korea Utara atas keputusan sepihak yang dilakukan oleh Malaysia. Disisi lain, Malaysia juga memiliki kesusahan sendiri, warga asing yang sudah menetap di negaranya selama 1 dekade menjadi incaran FBI (Intelejen Amerika) sejak 2019. Pihak Malaysia juga merasa hal tersebut harus dilakukan guna menjaga keamanan dan kesejahteraan negaranya. Setelah insiden tersebut, keduanya mengambil kebijakan untuk memutuskan hubungan diplomasi, dan berakhir menarik pulang duta masing-masing negara yang bertugas beserta staff-staffnya yang diberi waktu selama 48 jam.

Pada Penelitian ini, penulis akan membahas lebih lanjut terkait hubungan diplomatik Korea Utara dan Malaysia yang putus dan juga dampak setelahnya. Berikut bagan kerangka berpikir yang akan dimuat terkait pembahasan yang akan dipaparkan

Bagan 1. Kerangka Berpikir

